

BAB 1

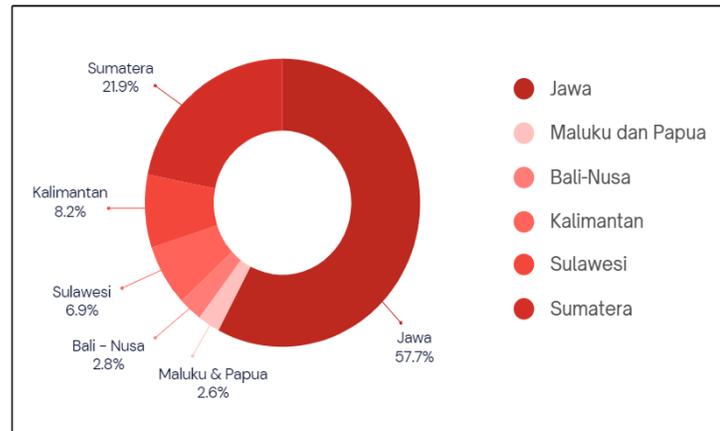
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah agenda pembangunan global yang mencakup 17 tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2030. Agenda ini diumumkan oleh negara-negara maju dan berkembang dalam Sidang Umum PBB pada bulan September 2015 (Bappenas, n.d.). Diantara 17 tujuan yang ditetapkan dalam SDGs, Goal 10 yakni "*Reducing Inequalities*" atau "Pengurangan Kesenjangan" menjadi salah satu prioritas strategis dalam implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diinisiasi oleh PBB. Tujuan ini menekankan pada upaya sistematis untuk mengurangi disparitas pembangunan baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun spasial antar wilayah (Perserikatan Bangsa - Bangsa Indonesia, n.d.).

Berdasarkan laporan Komnas HAM (2017), serupa dengan banyak negara di dunia, Indonesia menghadapi tantangan ketimpangan yang lebih serius dibandingkan negara Asia Timur lainnya, dimana terjadi konsentrasi pendapatan nasional sebesar 50% pada kelompok masyarakat terkaya. Kondisi ini dipertegas dengan temuan bahwa di Indonesia, akumulasi kekayaan empat orang terkaya melebihi total aset 100 juta penduduk termiskin. Ketimpangan ini juga tercermin dalam disparitas pembangunan antar wilayah, dimana diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dibandingkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) untuk mencapai pemerataan pembangunan (Kementerian PPN/Bappenas, 2022). Menurut laporan DJPK dan Kemenkeu, Kontribusi ekonomi di Kawasan Barat

Indonesia (KBI) mencapai 82,3% berbanding terbalik dengan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang hanya 17,7%, ini mengindikasikan masih tingginya kesenjangan ekonomi antarwilayah (DJKP & Kemenkeu, 2024).



Gambar 1. 1 Kontribusi PDRB Menurut Wilayah (Y-on-Y) (persen), 2024
(Sumber: DJKP & Kemenkeu, 2024)

Salah satu wilayah yang menjadi representasi nyata dari ketimpangan ini tertuang secara resmi dalam Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa 62 daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Sebarannya berada di beberapa provinsi diantaranya Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua (Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, 2020)

Berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 pasal 1 yang juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, daerah tertinggal didefinisikan sebagai wilayah

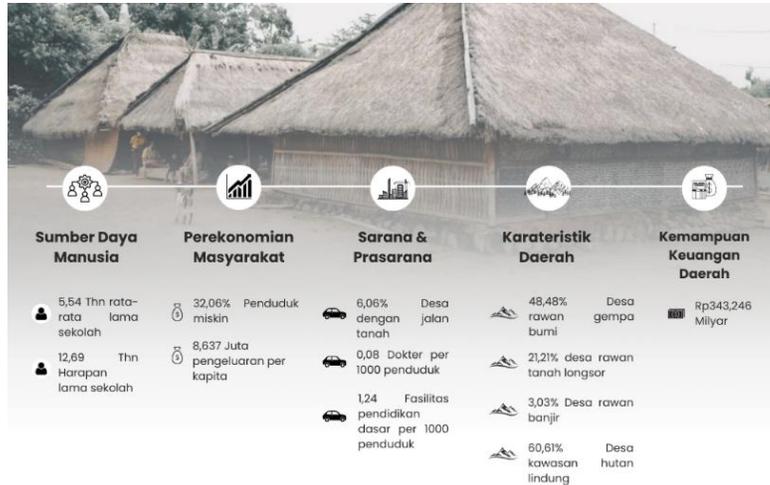
dengan tingkat perkembangan wilayah maupun masyarakatnya relatif tertinggal dibandingkan wilayah lain.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menetapkan status daerah tertinggal didasarkan pada enam kategori, yang meliputi ekonomi masyarakat, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, kemampuan finansial daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Tidak serupa dengan upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, konteks pembangunan di daerah tertinggal tidak sebatas pembangunan dalam hal ekonomi, namun mempengaruhi sosial budaya pula, sehingga dalam pembangunannya perlu diupayakan dengan baik (Hasyimi et al., 2023).

Berdasarkan indikator dan persyaratan yang telah ditetapkan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah diklasifikasikan sebagai daerah tertinggal. Kabupaten Lombok Utara menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji dalam penelitian kali ini karena KLU mempunyai potensi SDA yang melimpah dan banyaknya potensi pariwisata yang masih perlu dikembangkan. Seperti dalam penelitian Fariantin & Amri (2017), dalam kurun waktu 2010-2014 terdapat penambahan 17 lokasi wisata baru di daerah tersebut, sehingga jumlah objek wisata yang awalnya 26 lokasi bertambah menjadi 43 objek wisata. Potensi pariwisata ini tidak terlepas dari keindahan alam di Kabupaten Lombok Utara sebagai modal utama pengembangan sektor pariwisata. Sayangnya, KLU masih menghadapi sejumlah tantangan dalam hal pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

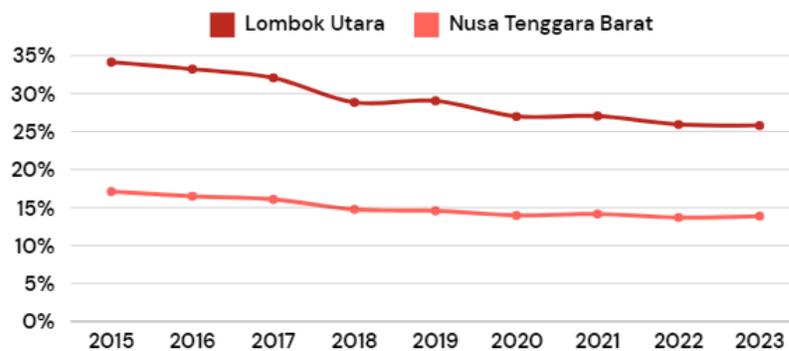
Menurut Balilatfo (2019) yang diterbitkan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Penyebab ketertinggalannya dibedakan menjadi lima kategori, yaitu

SDM, Perekonomian Masyarakat, Sarana dan Prasarana, Karakteristik Daerah, dan Kemampuan Keuangan Daerah.



Gambar 1. 2 Penyebab Ketertinggalan Kabupaten Lombok Utara
(Sumber: STRANAS-PPDT Tahun 2015-2019)

Gambar 1.2 di atas diketahui penyebab ketertinggalan Kabupaten Lombok Utara dipengaruhi beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, rendahnya kualitas SDM yang ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah hanya 5,54 tahun, masih jauh dari harapan lama sekolah 12,69 tahun. Kedua, tingginya angka kemiskinan mencapai 32,06% dengan pengeluaran per kapita sebesar 8,637 juta, menunjukkan masih rendahnya perekonomian masyarakat.



Gambar 1. 3 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Utara (Persen), 2015-2023

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Berdasarkan grafik pada gambar 1.3 menunjukkan angka kemiskinan Lombok Utara yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2015-2023. Meskipun terjadi penurunan persentase kemiskinan dari tahun 2015 sebesar 34,13% menjadi 23,96% tahun 2023, angka kemiskinan tersebut masih di atas rata-rata provinsi, yang berkisar antara 12,91% hingga 17,10%, yang menandakan masih terdapat tantangan signifikan dalam pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut (Badan Pusat Statistik, 2024).

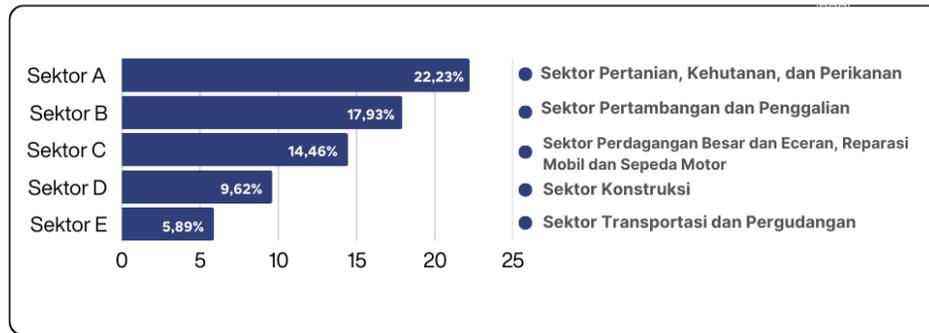
Faktor ketiga adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang ditandai dengan 6,06% desa memiliki jalan tanah, rendahnya rasio dokter (0,08 per 1000 penduduk), dan terbatasnya fasilitas untuk pendidikan dasar (1,24 per 1000 penduduk). Keempat, karakteristik daerah yang rentan bencana dengan 48,48% desa rawan gempa bumi, 21,21% desa rawan tanah longsor, 3,03% desa rawan banjir, dan 60,61% merupakan kawasan hutan lindung, menjadikan wilayah ini memiliki tantangan pembangunan yang kompleks.

Situasi ini semakin diperparah dengan bencana alam di Kabupaten Lombok Utara yang mengalami parahnya dampak dari gempa bumi tahun 2018 dan disusul dengan tantangan pandemi COVID-19. Kekuatan gempa bumi dengan Skala 6,9 Richter tersebut telah menyebabkan berbagai kerusakan di berbagai sektor seperti permukiman, infrastruktur, ekonomi, dan sosial dengan total kerugian mencapai lebih dari 9 Triliun Rupiah (Hartati et al., 2022). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 13 Agustus 2018, gempa berkekuatan 7 SR yang

mengguncang wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali mengakibatkan 436 korban jiwa, dimana 374 korban jiwa berasal dari Kabupaten Lombok Utara.

Faktor kelima yang tidak kalah penting adalah terbatasnya kemampuan keuangan daerah yang hanya sebesar Rp343,246 miliar. Sejalan dengan penelitian Adrian & Nugroho (2024), KLU masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan diklasifikasikan daerah tertinggal karena kemampuan keuangan daerahnya masih sangat rendah, terutama pada pendapatan asli daerah. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Aripin Salman (2022) yang menyatakan bahwa PDRB per-Kapita dari Faktor Kemandirian Daerah menjadi variabel yang paling menonjol mempengaruhi ketertinggalan daerah di Indonesia, sehingga menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah yang terbatas menjadi salah satu faktor kunci yang menghambat percepatan pembangunan di KLU.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan daerah terendah nomor dua dibandingkan Kab/Kota lain yang ada di provinsi NTB dengan pola pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun (Badan Pusat Statistik, 2024). Secara umum, kinerja perekonomian Kabupaten Lombok Utara (KLU) semakin mengalami tekanan pada saat masa covid-19 pada tahun 2017 tercatat -7,64%. Meskipun dalam periode berikutnya mengalami relatif tumbuh akan tetapi angkanya masih rendah sebesar 5.1% (Badan Pusat Statistik, 2024). Untuk melihat lebih detail sektor potensial di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dapat terlihat pada gambar 1.4 berikut.



Gambar 1. 4 Lima sektor terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB di kabupaten Lombok Utara periode 2019-2023
(Sumber: Badan Pusat Statistik)

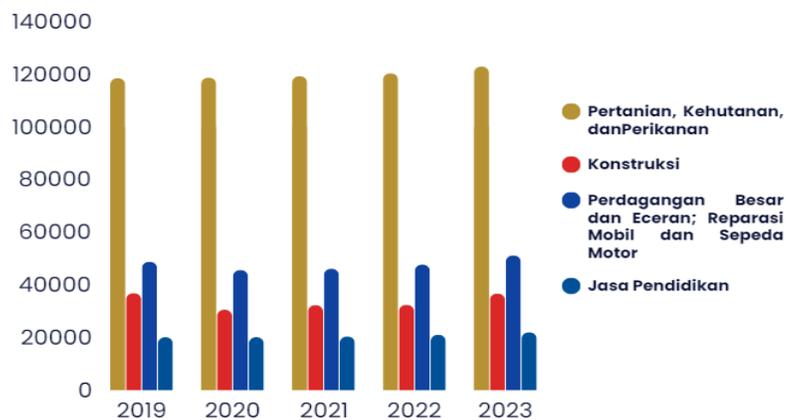
Kontribusi Sektor Pertanian yang dominan terhadap PDRB daerah menunjukkan mayoritas penduduk di Lombok Utara pun bekerja di sektor pertanian. Keunggulan ini didukung oleh kondisi geografis yang menguntungkan, dimana tanah vulkanik dari Gunung Rinjani memberikan kesuburan alami, serta sistem irigasi yang optimal dari aliran sungai yang bersumber dari Gunung Rinjani.

Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, terdapat 44.426 rumah tangga yang terlibat dalam usaha pertanian, dengan dominasi pada subsektor peternakan (68,24%), perkebunan (54,42%), hortikultura (38,56%), dan tanaman pangan (32,20%). Ditunjang oleh ketersediaan lahan sawah yang luas dan ketahanannya selama pandemi Covid-19, sektor ini berperan vital sebagai penggerak utama ekonomi daerah dengan total 29.342.202 orang pengelola usaha pertanian perorangan.

Pemerintah KLU berupaya memulihkan dan meningkatkan perekonomian melalui program pembangunan, namun terbatasnya fiskal daerah sebesar Rp343,246 miliar yang masih bergantung pada transfer pusat menuntut strategi yang lebih efisien. Dalam arahan Kemendesa PDT, setiap desa diarahkan untuk mengembangkan satu potensi lokal sebagai produk unggulan, sebagai strategi utama dalam penguatan

ekonomi desa di daerah tertinggal. Lebih lanjut, Bappenas melalui RPJMN 2020–2024 menjelaskan bahwa pengembangan koridor pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah merupakan strategi afirmatif untuk penciptaan lapangan kerja, nilai tambah, dan pemerataan ekonomi (BAPPENAS, 2020).

Pendekatan identifikasi dan pengembangan sektor unggulan dipilih sebagai strategi utama dalam pengentasan daerah tertinggal karena mampu memaksimalkan dampak pembangunan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif daerah. Sektor unggulan menawarkan efisiensi alokasi sumber daya yang tinggi melalui *multiplier effect* berkelanjutan dan keterkaitan sektoral yang kuat. Sebagai *prime mover*, sektor ini tidak hanya meningkatkan produktivitas internal, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pendukung, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan membangun rantai nilai terintegrasi. Pengembangannya berpotensi memberikan dampak transformatif yang cepat dan berkelanjutan, menciptakan siklus ekonomi yang saling menguatkan untuk mendukung pembangunan jangka panjang.



Gambar 1. 5 PDRB Empat sektor unggul KLU (Miliar Rupiah), 2019–2023
(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat bergantung pada tingkat produktivitas 17 sektor ekonomi yang membentuk PDRB (Karismawan et al., 2021). Berdasarkan gambar 1.5, *Trend* PDRB KLU mengalami peningkatan pada tiap tahunnya dari yang awalnya 3,38 triliun rupiah pada 2022 menjadi 3,55 triliun rupiah di tahun 2023. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh sekitar 5,10 persen. Peningkatan PDRB ini dikarenakan oleh produksi di 17 sektor lapangan usaha yang meningkat (Badan Pusat Statistik, 2024).

Beragam studi telah mengkaji mengenai potensi ekonomi, salah satunya oleh Karismawan et al. (2021) dengan hasil penelitian bahwa di KLU terdapat 6 sektor ekonomi unggulan yaitu sektor konstruksi; pengadaan; informasi dan komunikasi; pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta administrasi pemerintahan. Penelitian tentang pemetaan potensi ekonomi di Kabupaten Lombok Utara Karismawan et al. (2020) menemukan bahwa Kecamatan Gangga, kayangan dan bayan unggul di sektor pertanian; Kecamatan Pemenang dan Tanjung di sektor perkebunan.

Penelitian Hasyimi et al., (2023) menjelaskan daerah Kabupaten Pesisir Barat terdapat 9 sektor basis yaitu sektor perdagangan; sektor pertanian; sektor informasi; sektor administrasi; sektor real estate; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan; dan sektor jasa lain. Sedangkan penelitian oleh Nankeni et al., (2022) menunjukkan terdapat 10 sektor potensial di Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro yaitu sektor pertambangan; sektor industri pengolahan; sektor konstruksi; sektor perdagangan; sektor transportasi; dan sektor jasa lain yang tidak dirincikan.

Arsita & Adianita (2024), dengan alat analisis *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *Shift-share* dan Typology Klassen menunjukkan bahwa terdapat 9 sektor basis yaitu a) sektor pertanian (b) sektor pertambangan (c) sektor perdagangan (d) sektor penyediaan skomodasi (e) sektor jasa keuangan (f) sektor administrasi pemerintah (g) sektor jasa pendidikan (h) sektor jasa kesehatan (i) sektor jasa lainnya. Hasil penelitian Meilena et al. (2023) terdapat lima sektor unggulan yaitu: 1) sektor pertanian, 2) sektor pertambangan, 3) sektor konstruksi, 4) sektor administrasi pemerintahan, dan 5) sektor jasa pendidikan. Sedangkan sektor yang menunjukkan angka multiplier effect paling tinggi adalah sektor pertambangan, sektor pertanian dan sektor perdagangan.

Beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa lebih berfokus hanya pada proses identifikasi sektor unggulan dengan menggunakan tahapan alat analisis yang relatif terbatas dan belum menganalisis lebih mendalam keterkaitan sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Sedikitnya jumlah penelitian yang membahas kombinasi penentuan potensi sektor unggulan secara sistematis dengan berbagai pendekatan metode yang dikaitkan dengan upaya pengentasan daerah tertinggal.

Penelitian ini menyajikan informasi tentang sektor unggulan secara sistematis dan holistik dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik wilayah Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini akan mengintegrasikan analisis kuantitatif dengan perspektif kearifan lokal, meliputi strategi pemulihan ekonomi pascabencana dan pemetaan potensi ekonomi yang mempertimbangkan kekhasan geografis wilayah kepulauan serta dukungan sumber daya perikanan yang cukup melimpah.

Lebih lanjut, kompleksitas permasalahan Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah tertinggal memerlukan analisis yang tidak hanya mengidentifikasi sektor unggulan, tetapi juga memahami potensi pertumbuhan dan dampaknya terhadap perekonomian daerah secara komprehensif (Tutupoho, 2019). Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan dapat mengisi kesenjangan dalam literatur dan memberikan kontribusi baru terhadap strategi pengembangan wilayah tertinggal berbasis sektor unggulan.

1.2 Rumusan Masalah:

1. Sektor ekonomi unggulan apa saja yang dapat mendorong kemajuan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah tertinggal.
2. Bagaimana peran sektor ekonomi unggulan terhadap perekonomian di Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah tertinggal.

1.3 Tujuan Penelitian:

1. Mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan apa saja yang dapat mendorong kemajuan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah tertinggal.
2. Menganalisis peran sektor ekonomi unggulan terhadap perekonomian di Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah tertinggal.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian kali ini fokus dengan analisis kinerja dan pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Lombok Utara dengan membatasi ruang lingkup pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode 2019-2023. Penelitian akan

menggunakan empat metode analisis yaitu *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *Shift Share*, dan Tipologi Klassen untuk mengeksplorasi struktur dan dinamika ekonomi daerah.

1.5 Tujuan Penelitian

Temuan dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat untuk berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

- **Manfaat Akademis:** Penelitian bertujuan memberikan kontribusi teoritis dalam studi ekonomi daerah tertinggal, memperkaya literatur analisis struktural ekonomi. Hasil penelitian akan menjadi referensi penelitian serupa dalam menganalisis struktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- **Manfaat Praktis:** Penelitian bertujuan memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Hasilnya akan mengidentifikasi sektor basis dan potensial, menghasilkan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- **Manfaat Kebijakan:** Penelitian memberikan landasan ilmiah untuk strategi pengembangan wilayah, menghasilkan pemetaan komprehensif kinerja sektor ekonomi. Hasilnya dapat digunakan untuk menarik investasi, mendorong inovasi daerah, dan merancang program pemberdayaan ekonomi lokal guna mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Lombok Utara.